

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

Setelah pemaparan dan penjelasan pada bab-bab sebelumnya, penulis menarik kesimpulan yang akan dijelaskan dalam bab V ini mengenai alasan Indonesia bergabung ke dalam *Melanesian Spearhead Group*. Dalam pemaparan pada bab-bab sebelumnya kita dapat melihat bahwa bergabungnya Indonesia menjadi *associate member* di dalam *Melanesian Spearhead Group* menimbulkan berbagai isu yang menjadi polemik bagi Indonesia baik secara domestik, regional, maupun Internasional, sehingga masih sangat menarik jika diangkat menjadi sebuah bahan kajian secara akademis.

Dengan semakin berkembangnya Indonesia, kebijakan politik luar negeri yang muncul juga semakin kompleks. Karena bagaimanapun juga dengan perubahan-perubahan kapabilitas Negara dan stabilitas politik dalam negeri memberikan pengaruh yang sangat besar demi tercapainya tujuan tersebut. Namun, terlihat jelas, tidak hanya dipengaruhi oleh dinamika politik domestik, politik luar negeri Indonesia sekarang ini juga dipengaruhi oleh fenomena-fenomena yang muncul dalam hubungan internasional. Berbagai isu-isu mengenai separatisme tidak hanya sekali disuarakan, namun isu tersebut sudah berlangsung sejak bergabungnya Papua ke dalam NKRI. Dalam hal ini tidak hanya menjadi boomerang bagi Indonesia di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri. Bergabungnya Indonesia menjadi bagian dari *Melanesian Spearhead Group* terus mendapat halangan dari berbagai pihak yang tidak pro terhadap pembangunan, dimana pemerintah Indonesia di bawah pimpinan Joko Widodo selalu dihadapkan dengan isu-isu mengenai pembantaian HAM di Papua. Hal ini kemudian

membuat pemerintah Indonesia berupaya untuk dengan cepat dan tepat namun secara terarah menangani isu-isu tersebut agar tidak merugikan Indonesia dalam berperan aktif di wilayah Pasifik Selatan. Dalam pembahasan tesis ini, jangkauan penelitian penulis fokuskan pada kebijakan politik luar negeri Indonesia di bawah pimpinan Joko Widodo.

Latar belakang hubungan kerjasama Indonesia dan negara-negara Pasifik Selatan didasari oleh kebutuhan dan kepentingan masing-masing tiap negara. Indonesia banyak memberi bantuan berupa kerjasama teknis seperti capacity building di bidang ekonomi dan good governance di bidang politik kepada negara-negara Pasifik Selatan (Fiji, Vanuatu, Papua Nugini), sebab negara-negara di Pasifik Selatan minim akan kemajuan pembangunan negaranya yang disebabkan oleh kapasitas sumber daya manusia yang kurang, demografi yang jumlahnya sedikit, serta akses yang sulit dijangkau. Adapun tujuan utama selain membantu pembangunan negara demi menjaga kestabilan kawasan, manfaat yang Indonesia dapatkan adalah meredam dukungan-dukungan ketiga negara tersebut dalam upaya kemerdekaan Papua Barat dari Indonesia. Kesamaan etnis Melanesia yang membuat negara-negara di Pasifik Selatan yang dimana atas nama solidaritas mendukung penuh separatisme Papua Barat. Isu ini juga sudah menjadi isu internasional yang mengkhawatirkan Indonesia terhadap ancaman kedaulatan keutuhan NKRI.

Dukungan yang diberikan oleh beberapa negara anggota *Melanesian Spearhead Group* terhadap kelompok separatis Papua karena persamaan ras membuat Indonesia mengambil kebijakan soft power dengan upaya diplomasi menggunakan kerjasama teknik yang

pada dasarnya diarahkan untuk mencapai sasaran seperti menjamin keutuhan NKRI. Indonesia sebagai aktor utama telah mengambil kebijakan secara rasional dengan memperhitungkan untung dan rugi atas keterlibatannya dengan *Melanesian Spearhead Group*. Indonesia melihat bahwa negara-negara di Pasifik Selatan memiliki potensi sumberdaya yang bisa dikembangkan. Sehingga saat ini melalui soft power, Indonesia masuk dengan smooth untuk menaburkan bantuan-bantuan yang akan di panen oleh Indonesia di masa mendatang.

Upaya-upaya yang dilakukan Indonesia sejauh ini membuahkan hasil yang baik. Hal ini terlihat dari ditolaknya permintaan ULMWP untuk menjadi *full member* dalam *Melanesian Spearhead Group*. Dukungan penuh dari Papua Nugini dan Fiji terhadap kedaulatan Indonesia menjadi pegangan utama bagi Indonesia untuk menaikkan statusnya menjadi full member. Penolakan terhadap ULMWP adalah karena mereka bukan sebuah negara, apapun alasannya merreka tidak punya hak untuk menjadi *full member* dengan pertimbangan sesuai prosedur ULMWP bukan wakil rakyat Papua secara keseluruhan. Keberadaan Indonesia sebagai anggota *Melanesian Spearhead Group* ini juga akan menguntungkan dalam membangun hubungan diplomasi, terutama terkait isu Papua Merdeka. Adanya peningkatan kapasitas diplomasi Indonesia di kancah internasional menjadi hal yang menguntungkan bagi Indonesia untuk mengubah dukungan negara-negara *Melanesian Spearhead Group* mengenai kedaulatan Indonesia terhadap Papua sebagai bagian dari NKRI. Pemerintah akan lebih mudah memberikan pemahaman bahwa Indonesia sangat peduli dengan masyarakat Melanesia, terutama yang ada di Provinsi Papua dan Papua Barat. Pemahaman ini tentu dilakukan dalam bentuk pembentukan kebijakan yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat. Indonesia telah menyadari bahwa sebenarnya masyarakat Indonesia di Papua dalam keadaan baik-baik saja, masyarakat menjalankan aktivitasnya secara normal dan kondusif. Roda pemerintahan dan intervensi kebijakan yang dilakukan pemerintah pun berjalan lancar. Sehingga ketika ada aksi masyarakat yang mengatasnamakan rakyat Papua ingin merdeka tentu perlu dipertanyakan, apakah benar itu sesuai dengan keinginan masyarakat disana. Untuk itu, tergabungnya Indonesia sebagai anggota *Melanesian Spearhead Group* diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat di dunia terutama rakyat Melanesian bahwa Indonesia masih sangat mampu mengelola konflik rumah tangganya sendiri.